

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyusunan Laporan Keuangan harus jelas untuk pelaporan bagi pihak yang memberikan sumbangan. Laporan Keuangan secara umum bertujuan untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggung jawaban manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Laporan keuangan pada organisasi nirlaba terdiri atas neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan (IAI, 2012).

Diterbitkannya Penganggaran berbasis kinerja yang dituangkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, dan undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara pasal 68 dan pasal 69 memberikan arahan baru bahwa instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

Dengan perubahan sistem keuangan rumah sakit serta sistem keuangan pemerintah, secara keseluruhan diharapkan dana yang dikelola oleh rumah sakit akan menjadi lebih besar dan terus meningkat sejalan dengan peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) serta persiapan badan layanan umum dari tahun ke tahun. Kondisi ini selain akan membawa pengaruh positif bagi peningkatan pelayanan, tetapi juga membuka peluang untuk timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara. Untuk itu diperlukan berbagai upaya dalam mengatasinya.

Badan Layanan Umum (BLU) adalah instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. BLU ini dibentuk agar organisasi sektor publik seperti rumah sakit mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangannya sehingga mampu menerapkan bisnis yang sehat tapi tidak mengutamakan mencari keuntungan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mencegah timbulnya akses negatif penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara dan tercapainya tujuan BLU/BLUD, sebaiknya perlu dilakukannya pengendalian terhadap biaya-biaya yang akan dikeluarkan dan mengurangi biaya-biaya yang tidak efektif dalam kegiatannya, oleh karena itu BLU/BLUD perlu menerapkan metode yang berguna untuk menunjang pengendalian biaya.

Akuntansi pertanggungjawaban merupakan metode yang paling banyak digunakan karena dengan menggunakan akuntansi pertanggungjawaban memungkinkan suatu organisasi untuk merekam seluruh aktivitasnya kemudian mengetahui bagian/unit yang bertanggung jawab atas aktifitas tersebut, dan menentukan bagian/unit mana yang tidak berjalan secara efektif dan efisien

Dengan adanya akuntansi pertanggungjawaban, pimpinan dapat mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab ke tingkat pimpinan di bawahnya dengan lebih efisien tanpa memantau secara langsung seluruh kegiatan perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban juga perlu dievaluasi agar berlangsung dengan baik sehingga manajemen dapat dengan mudah menghubungkan biaya yang timbul dengan manajer pusat pertanggungjawaban yang bertanggung jawab. Penerapan akuntansi pertanggungjawaban yang memadai mampu mendorong perusahaan guna mencapai tujuan perusahaan.

Badan layanan umum yang menerapkan akuntansi pertanggungjawaban akan membentuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Menurut Samryn (2012:259) "Pusat pertanggungjawaban merupakan suatu bagian dalam organisasi yang memiliki kendali atas terjadinya biaya, perolehan pendapatan, atau penggunaan dana investasi.

Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya yang diselenggarakan pada semua bidang kehidupan. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dengan demikian, Pembangunan kesehatan merupakan salah satu upaya utama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan mendukung percepatan pencapaian

sasaran pembangunan kesehatan masyarakat. Namun rumah sakit milik pemerintah dinilai masih rendah baik dari segi pelayanan maupun dari segi pengendalian manajemennya.

Rumah sakit sebagai salah satu institusi pelayanan publik memegang peranan penting bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Rumah sakit dimntut untuk dapat melayani masyarakat, dapat berkembang dan mandiri serta hams mampu bersaing dan memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau bagi masyarakat. Dengan scmakin tingginya tuntutan bagi mmah sakit untuk meningkatkan pelayanannya, banyak permasalahan yang muncul terkait dengan terbatasnya anggaran yang tersedia bagi operasional rumah sakit, alur birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pencairan dana, atm'an pengelolaan keuangan yang menghambat kelancaran pelayanan dan sulitnya untuk mengukur kinerja, sementara rumah sakit memerlukan dukungan SDM, teknologi, dan modal yang sangat besar.

Secara umum rumah sakit pemerintah sebagai organisasi sektor publik (Nirlaba) sering dianggap pelayanannya kurang dibandingkan dengan rumah sakit organisasi sektor swasta yang lebih mmtingkan pelayanan. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kab Buleleng sebagai Badan Layanan Umum Dacrah adalah instansi di lingkungan pemcrintahan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Rumah sakit pemerintahan merupakan entitas non profit karena dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat tidak mengutamakan keuntungan

karna rumah saki milik pemerintah tidak mencari laba. Perbedaan utama yang mendasar dalam terletak pada tata cara entitas nirlaba mempeleh sumbr daa diutuhkan unuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba, dan tidak ada kepemilikan dalam entitas nirlaba.

Berdasarkan pemaparan diatas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Buleleng terus berupaya agar memperoleh fleksibilitas dala pengelolaan keuangannya sehingga mempermudah usaha Rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanannya yang diberikan kepada masyarkat. RSUD kab Buleleng berdiri tahun 1955, pada saat itu bernama Rumah sakit Tentara dan juga milik umum. Pada tahun 1959 beralih fungsi menjadi RSUD kelas C milik Depkes RI. Berdasarkan keputusan Bupati Buleleng No. 551 tertanggal 22 September 1996, RSUD difungsikan sebagai uji coba menuju unit swadana. Pada tanggal 20 Mei 1997 berdasarkan SK Menkas RI No. 46/1997, RSUD ditetapkan sebagai tip B Non Pendidikan.

Kemudian berdasarkan SK Bupati No. 524 tertanggal 8 oktober 2003, RSUD ditetapkan sebagai unit Swadana dan ditindaklanjuti dengan SK Bupati No. 61 tertanggal 224 Maret 2004 tetang penerapan tarif kelas I, II, Utama, Madyatama dan Mahotama. Status pola pengelolaan keuangan RSUD Kabupaten Buleleng brubah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 589 trtanggal 26 Desmber 2006 yang menetapkan Status Pengelolaan Keuangan Rumah Sakit Umum Darah Kabupaten Buleleng Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Beberapa penelitian sebelumnya seperti Rahmawati, (2009) dalam penelitiannya yang berjudul sistem Akuntansi Pertanggungjawaban yang dimiliki

oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara adalah Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban berbasis Aktivitas (Activiti-based Responsibility Accounting System). Dan sistem Akuntansi Pertanggungjawaban juga digunakan untuk menilai kinerja manajer pusat biaya PT PLN dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai sarana untuk melihat kinerja manajer dalam suatu periode .

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Nuraini dan Betri (2014) yang berjudul penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat untuk biaya studi kasus PT Pusri Palembang menyimpulkan dari penelitiannya sebagai berikut: a) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pusri Palembang telah memadai. b) Pelaksanaan penilaian kinerja pada PT. Pusri Palembang telah memadai. c) Pada pusat biaya terdapat beberapa kelemahan yaitu adanya situasi dan kondisi yang berubah-ubah seperti kenaikan harga bahan bakar gas, perubahan kurs dollar yang menjadi parameter dalam penyusunan anggaran dan biaya jasa profesional yang sulit untuk dianggarkan karena biaya ini bersifat insidental dan tidak memiliki standar tertentu. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan gaji para profesional yang mengikuti UMR. d) Pada pusat investasi, kinerja perusahaan sudah cukup baik. Kenaikan dan penurunan ROI dan ROE disebabkan oleh naik-turunnya laba akibat pengaruh volume produksi dan penjualan pupuk terutama pada amoniak. Selain itu, pemisahaan diri (spin off) juga berpengaruh cukup besar terutama pada tahun 2010 sehingga aset dan laba yang dihasilkan harus dialihkan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian tentang “Penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat pengendalian biaya pada RSUD KAB BULELENG”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah diterapkan oleh RSUD Kab Buleleng?
2. Bagaimana manfaat akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sebagai alat penilaian kinerja rumah sakit?

1.3 Pembatasan Masalah

Dari Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak RSUD Kab. Buleleng dalam merancang sistem Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah diterapkan oleh RSUD Kab Buleleng.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. untuk mengetahui bagaimana Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah diterapkan oleh RSUD Kab Buleleng.
2. Untuk Mengetahui bagaimana manfaat akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sebagai alat penilaian kinerja rumah sakit.

1.5 Manfaat Hasil Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini penulis mencoba memberikan hasil penelitian Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah diterapkan oleh RSUD Kab Buleleng .

1.5.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Masyarakat pada Umumnya, Mahasiswa pada Khususnya

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat meningkatkan Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah diterapkan oleh RSUD Kab Buleleng

- b) Bagi Pihak RSUD Kab Buleleng

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan bagi pihak-pihak lain yang tertarik untuk melaksanakan penelitian terhadap permasalahan yang sama serta mampu memilih dan memilah pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti untuk penelitian dimasa yang akan datang.

